

KEPEMIMPINAN MASYARAKAT JAWA (ANALISIS PEMIKIRAN MAX WEBER: MASYARAKAT ABANGAN, SANTRI, PRIYAYI DI SURAKARTA, INDONESIA)

JAVANESE COMMUNITY LEADERSHIP (MAX WEBER'S THOUGHT ANALYSIS: COMMUNITIES OF ABANGAN SANTRI, PRIYAYI IN SURAKARTA, INDONESIA)

MAYANA RATIH PERMATASARI¹ & SUBAIDI²

¹ Institut Agama Islam Negeri Surakarta

² Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Corresponding authors: my.ratih1212@gmail.com & subaidi@unisnu.ac.id

Received: 08 Dec 2021

Accepted: 25 Dec 2021

Published: 30 Dec 2021

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap terbentuknya kepemimpinan dalam masyarakat Abangan, Santri dan Priyayi di Surakarta, dan mengklasifikasikan tipologi kepemimpinan dalam masyarakat Abangan, Santri dan Priyayi Surakarta. Penelitian ini merupakan riset pustaka yang bersifat kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif melalui pendekatan antropologi. Teknik pengumpulan data berupa kajian literatur, observasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian antara lain: *pertama*, Kepemimpinan golongan Abangan. Berdasarkan analisis teori otoritas kepemimpinannya Weber, gaya kepemimpinan golongan Abangan dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan karismatik karena mensyaratkan sifat-sifat yang menonjol sebagai pemimpin sehingga mendapat pengakuan dan kepatuhan dari masyarakat; *kedua*, Kepemimpinan pada golongan Santri, dalam hal ini kyai di pesantren. Berdasarkan analisis teori otoritas kepemimpinannya Weber dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan karismatik. Ini menimbang ada begitu banyak syarat kelebihan dan keistimewaan seseorang untuk dapat disebut kyai berupa penguasaan ilmu agama yang tinggi. Makna karisma dalam praktek kepemimpinan di pesantren harus dibedakan maknanya dengan makna karisma pada praktek kepemimpinan masyarakat Abangan yang ditandai dengan kelebihan berupa kekuatan gaib maupun keistimewaan lain yang bertalian dengan klenik; dan *ketiga*, Kepemimpinan dalam masyarakat Priyayi. Berdasarkan analisis dari teori otoritas kepemimpinan Weber, dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan tradisional. Meskipun begitu, seorang raja dibatasi kekuasaannya dengan undang-undang yang harus dipatuhi. Artinya, ada persinggungan antara tipologi kepemimpinan tradisional dengan tipologi kepemimpinan legal-rasional disini bahkan terdapat pula unsur kepemimpinan karismatik karena raja harus berwibawa dan memiliki kelebihan tertentu. Meskipun demikian, pola terbentuknya kepemimpinan di keraton lebih dominan cirinya sebagai tipologi kepemimpinan tradisional yang diperoleh melalui jalur keturunan.

Kata kunci: kepemimpinan, Jawa, tradisional, legal-rasional, karismatik

Abstract: *This study aims to reveal the formation of leadership in the Abangan, Santri and Priyayi communities in Surakarta, and classify the typology of leadership in the Abangan, Santri and Priyayi communities in Surakarta. This research is a qualitative literature research using descriptive analysis method through an anthropological approach. Data collection techniques in the form of literature review, observation and interviews. The data analysis technique in this research is through the steps of data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. The results of the study include: first, the leadership of the Abangan group. Based on the analysis of Weber's theory of leadership authority, the leadership style of the Abangan group can be categorized as charismatic leadership because it requires prominent qualities as a leader so that it gets recognition and obedience from the community; second, leadership in the Santri group, in this case the kyai in the pesantren. Based on the analysis of Weber's theory of leadership authority, it can be categorized as charismatic leadership. This is considering there are so many conditions for a person's advantages and privileges to be called a kyai in the form of a high mastery of religious knowledge. The meaning of charisma here must be distinguished from the charisma of the Abangan society which is characterized by advantages in the form of supernatural powers and other privileges related to the occult; and third, Leadership in Priyayi society. Based on the analysis of Weber's theory of leadership authority, it can be categorized as traditional leadership. Even so, a king is limited in power by laws that must be obeyed. That is, there is an intersection between the traditional leadership typology and the legal-rational leadership typology here and there is even an element of charismatic leadership because the king must be authoritative and has certain advantages. However, the pattern of leadership formation in the palace is more dominant in its characteristics as a traditional leadership typology obtained through heredity.*

Keywords: *leadership, Javanese, traditional, legal-rational, charismatic*

Cite this article: Mayana Ratih Permatasari & Subaidi. (2021). Kepemimpinan masyarakat Jawa (Analisis pemikiran Max Weber: masyarakat Abangan, Santri, Priyayi di Surakarta, Indonesia). *Javanese community leadership (Max Weber's thought analysis: communities of Abangan, Santri, Priyayi in Surakarta, Indonesia)*. Global Journal of Educational Research and Management (GERMANE), 1(4), 232-245.

PENDAHULUAN

History is a story of the great people. Sebuah adagium yang berkembang dalam masyarakat sejak kuno hingga kini. Secara implisit adagium tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya sejarah dibangun oleh peran besar seseorang yang menorehkan jejak kehebatannya dalam mempengaruhi sebuah peradaban. Dalam konteks kepemimpinan, kemampuan mempengaruhi itulah yang merupakan makna inti dari kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif mempunyai daya gerak dan daya ubah yang besar terhadap corak dinamika kehidupan sebuah masyarakat bahkan secara tidak langsung menjadi pilar pembangun sebuah peradaban.

Dalam konteks budaya Jawa, terdapat berbagai piwulang dan pitutur yang mengajarkan tentang sifat-sifat seorang pemimpin. Ajaran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai tiga pilar utama, yaitu: “*Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani.*” Dalam filsafat Jawa juga terdapat beberapa istilah tentang sifat-sifat pemimpin yang yang dikenal dengan “empat T,” yaitu *teteg-*

sebagai pengayom, *tatag*-berani, *tangguh*-kuat, dan *tanggon*-pantang mundur dalam menyelesaikan segala rintangan (Endraswara, 2013).

Surakarta, adalah sebuah wilayah kerajaan Jawa yang masih eksis hingga saat ini. Masyarakat Jawa Surakarta dikenal mempunyai ikatan yang kuat dengan budayanya dan senantiasa menjaga kelestarian budaya tersebut. Dari sisi antropologis, masyarakat Surakarta mempunyai sifat ketundukan yang tinggi terhadap pemimpinnya. Kendatipun saat ini, kepemimpinan Raja di kasunanan Surakarta lebih merupakan sebuah simbol budaya saja, bukan berbentuk kekuasaan dalam pemerintahan yang mutlak. Secara antropologis, berdasarkan perilaku beragamnya, komposisi masyarakat Jawa di Surakarta dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Abangan, Santri dan Priyayi. Masing-masing klasifikasi tersebut mempunyai kekhasan kebiasaan kepemimpinan yang khas. Ini bukan berarti masyarakat Jawa Surakarta mengabaikan kekuasaan rajanya. Namun dalam konteks sosial budaya di masyarakat, baik Abangan, Santri maupun Priyayi mempunyai figur anutan yang dianggap pemimpin. Tentu saja terdapat kekhasan dalam proses terbentuknya kepemimpinan, gaya kepemimpinan dan tipologi kepemimpinan dari masing-masing klasifikasi tersebut. Hal ini mengingat bahwa masing-masing klasifikasi mempunyai akar budaya yang berbeda yang mempengaruhi kehidupan soal kemasyarakatan dan keagamaan.

Menarik untuk ditelisik lebih lanjut, bagaimana proses terbentuknya kepemimpinan dalam struktur masyarakat Jawa. Tipe kepemimpinan seperti apa yang dijalankan oleh para pemimpin yang lahir dari rahim budaya Jawa tersebut? Apa dan seperti apa gaya kepemimpinan dalam struktur masyarakat Jawa?

Untuk mencoba mencari jawab dari pertanyaan-pertanyaan di atas, penulis menggunakan teori otoritas kepemimpinan yang dikemukakan oleh seorang tokoh sosiologi Barat bernama Maximillian Weber. Menurut teori otoritas Weber, terdapat tiga tipe otoritas yaitu: otoritas tradisional, otoritas legal-formal dan otoritas karismatik (Hansen, 2001). Penulis perlu melakukan pembatasan obyek pengamatan -dalam hal ini masyarakat Jawa di wilayah Surakarta- dengan meminjam teori Geertz tentang klasifikasi budaya masyarakat Jawa. Geertz mengklasifikasikan masyarakat Jawa menjadi tiga yaitu Abangan (mewakili kelompok muslim sinkretis), Santri (mewakili kelompok Islam taat), dan Priyayi (mewakili kelompok bangsawan keraton). Tiga klasifikasi tersebut merupakan inti struktur sosial utama di Jawa, khususnya masyarakat pedesaan (Geertz, 2014). Masing-masing klasifikasi masyarakat Jawa tersebut memiliki ciri dan keunikan tertentu khususnya dalam proses pembentukan kepemimpinan, perilaku kepemimpinan, dan relasi pemimpin dengan yang dipimpin. Selanjutnya, teori otoritas Weber akan mencoba menyorot tipologi kepemimpinan dari tiga klasifikasi masyarakat Jawanya Geertz tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang difokuskan pada upaya penelusuran materi dan konsep yang terdapat dalam sumber pustaka. Penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian tentang teori otoritas kepemimpinan Max Weber dan klasifikasi masyarakat Jawa menurut Clifford Geert. Ada dua buku yang penulis jadikan rujukan utama, yaitu buku *Max Weber, Charisma, and The*

Disenchantment of the Word (Chapter 8) karya George P. Hansen dan buku *Agama Jawa; Abangan Santri Priyayi dalam Kebudayaan Jawa* karya Clifford Geert yang diterjemahkan oleh Aswab Mahasin dan Bur Rasuanto. Data sekunder meliputi penelitian-penelitian ilmiah yang memiliki kedekatan tujuan dan pembahasan dengan penelitian ini.

Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknik analisis konten, yang mencoba mendeskripsikan konstruksi dasar konsep otoritas kepemimpinan Max Weber, proses pembentukan kepemimpinan pada masing-masing klasifikasi masyarakat Jawa di Surakarta (Santri, Abangan dan Priyayi) menurut Clifford Geertz, mengidentifikasi perilaku kepemimpinannya, kemudian menganalisis secara kritis proses terbentuknya kepemimpinan klasifikasi masyarakat Jawa tersebut dengan teori otoritas kepemimpinan Max Weber.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi, yaitu mencoba memahami tingkah laku dan tata cara kehidupan serta proses perjalanan manusia. Dalam hal ini, penulis berusaha menyusun pendeskripsian tentang manusia dan perilakunya untuk mendapatkan pengertian yang tidak berprasangka. Adapun teknik pengumpulan data berupa kajian literatur, observasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kepemimpinan Masyarakat Jawa

Dari pendekatan bahasa Jawa, kata “pimpin” adalah kata dasar dari kepemimpinan yang bermakna bimbing atau tuntun. Setelah mendapat imbuhan ke- dan -an, kata pimpin berubah menjadi “kepemimpinan” yang bermakna perihal pemimpin dan/atau cara memimpin. Secara umum, istilah kepemimpinan dapat dimaknai sebagai suatu proses ketika seseorang memimpin (*directs*), membimbing (*guides*), memengaruhi (*influences*) atau mengontrol (*controls*) pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain (Koentjaraningrat, 1980).

Setiap organisasi maupun kelompok masyarakat apapun bentuknya, pasti memerlukan seseorang untuk menempati posisi sebagai pemimpin (*leader*), dan mengemban tugas melaksanakan kepemimpinan (*leadership*). Pemimpin, dalam hal ini diartikan sebagai orang yang berada di depan dan memiliki pengikut, baik orang tersebut menyestatkan atau tidak (Wirawan, 2017). Dengan demikian, pemimpin adalah orangnya sedangkan kepemimpinan adalah kegiatannya. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan/kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama (Nawawi & Hadari, 1993).

Secara esensial kepemimpinan termasuk dalam kajian konsep hubungan manusia, karena proses kepemimpinan berlangsung di mana saja dan kapan saja dalam hubungan timbal balik antara individu dan kelompok. Ketika berbicara kepemimpinan maka ia akan berbicara perihal pemimpin, orang yang memimpin baik itu cara dan konsep, mekanisme pemilihan pemimpin, dan lain sebagainya. (Salam, 2014).

Jadi, penulis dapat menyarikan makna kepemimpinan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Masyarakat Jawa di Surakarta

Masyarakat Jawa atau lebih tepatnya suku bangsa Jawa, secara antropologi budaya adalah orang-orang yang hidup kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai ragam dialeknya secara turun temurun. Lalu, di pulau Jawa ini, di wilayah manakah suku Jawa tinggal? Masyarakat Jawa adalah mereka yang tinggal di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta mereka yang tinggal di kedua daerah tersebut. Bila dilihat secara geografis, suku bangsa Jawa mendiami wilayah pulau Jawa yang meliputi Kedu, Banyumas, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang dan Kediri, sedangkan di luar wilayah tersebut dinamakan pesisir dan ujung timur (Tiwikromo, 2008).

Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah sebuah kerajaan di Jawa Tengah yang berdiri pada tahun 1755 merupakan bekas kerajaan Islam Mataram abad XVI. Sebagai hasil dari perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian antara VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dengan pihak-pihak yang bersengketa di kesultanan Mataram (Sunan Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi) yang menghasilkan kesepakatan bahwa kesultanan Mataram dibagi dalam dua wilayah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta di bawah kepemimpinan Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Hamengkubuwono I (Yogyakarta, 2021). Surakarta adalah pusat dari kebudayaan masyarakat Jawa. Dalam budaya Jawa, keraton merupakan kiblat dalam tradisi, etika, bahasa maupun kekuasaan. Seorang ratu dianggap sebagai punjer (sentral) dari kosmos kehidupan masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa cenderung terikat satu dengan yang lain. Ikatan tersebut berupa norma-norma hidup, sejarah, tradisi maupun agama (Sari, 2019).

Masyarakat Jawa Surakarta dalam konteks tulisan ini adalah masyarakat suku Jawa yang tinggal dan menganut tradisi Jawa dalam pengaruh budaya dan kekuasaan keraton Kasunanan Surakarta.

Klasifikasi Masyarakat Jawa

Clifford James Geertz, adalah antropolog terkenal dari Amerika. Ia semakin dikenal melalui penelitian-penelitiannya di Indonesia dan Maroko dalam bidang agama, perkembangan ekonomi, struktur politik tradisional serta kehidupan desa dan keluarga. Pada tahun 1950-an, Geertz bersama timnya melakukan riset di pulau Jawa, tepatnya di sebuah kota yang disebutnya secara tersamar sebagai 'mojokuto' (Kediri?). Geertz mengamati struktur sosial, struktur budaya, perilaku keagamaan Islam, roda ekonomi, pembentukan kekuasaan, dan perilaku keseharian masyarakat Jawa (Anam, 2016).

Pengamatannya yang paling menonjol adalah pengamatan terhadap agama-agama di Jawa dan perilaku religi masyarakat Jawa saat itu. Hasil pengamatannya dibukukan dalam sebuah buku yang hingga saat ini masih menjadi rujukan banyak akademisi di dunia. Tesis Geertz yang paling populer adalah tentang trikotomi masyarakat Jawa yang merupakan hasil pengamatannya secara antropologis terhadap perilaku keberagaman Islam masyarakat Jawa.

Terkait dengan perilaku keagamaan Islam masyarakat Jawa, Geertz mengklasifikasikan masyarakat Jawa menjadi tiga (Geertz, 2014), yaitu:

i. Golongan Abangan

Geertz mencirikan golongan ini sebagai masyarakat yang gemar melakukan selamatan, percaya pada makhluk halus, dan pengobatan dengan mantra dan sihir. Golongan ini mewakili suatu titik berat pada aspek animistik dan sinkretisme Jawa. Abangan menjalani kepercayaan keagamaan Jawa yang asli, secara luas abangan dihubungkan dengan elemen petani.

ii. Golongan Santri

Santri, menurut Geertz, adalah masyarakat yang yang mentaati peraturan-peraturan dalam ajaran Islam dalam hal ketauhidan, melakoni ritual wajib, dan meninggalkan larangan semisal minuman keras. Santri sangat perhatian terhadap tafsiran moral dan sosial dari doktrin-doktrin keagamaan yang diyakini.

iii. Golongan Priyayi

Priyayi menjalani ritual keagamaan seperti Abangan. Mereka adalah pewaris kebudayaan Jawa yang adi luhung. Istilah wayang, kesenian Jawa, kesusastraan, birokrasi Jawa (berbasis pada keraton) semua dikaitkan dengan golongan Priyayi ini. Selanjutnya, Belanda mempunyai andil untuk membaratkan priyayi ini. Dalam perkembangannya, priyayi yang ala Baratlah yang berkesempatan dalam birokrasi.

Lebih lanjut, Geertz mencatat trikotomi itu sekaligus mencerminkan organisasi moral kebudayaan Jawa. Pertama, Abangan mewakili suatu titik berat pada aspek animistik dari sinkretisme Jawa. Abangan menjalani kepercayaan keagamaan Jawa yang asli. Secara luas abangan dihubungkan dengan elemen petani. Kedua, Santri mewakili suatu titik berat pada aspek Islam dari sinkretisme itu dan terutama dihubungkan dengan elemen dagang. Sementara, priyayi dihubungkan dengan elemen birokratik (Anam, 2016). Trikotomi ini, kata Geertz, dikatakan sendiri oleh orang Jawa (Geertz, 2014).

Sebagai antropolog budaya, Geertz menggunakan ritual-ritual atau dan kepercayaan terhadap agama dalam masyarakat yang ditelitinya sebagai acuan utama untuk mendapatkan suatu kesimpulan antropologis. Ciri utama antropologi Geertz adalah keinginannya yang kuat untuk dapat memberikan pemaknaan mendalam terhadap fenomena budaya yang ditelitinya (Anam, 2016).

Teori Trikotomi Kepemimpinan Max Weber

Maximilian Weber adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi dan sosiologi dari Jerman. Yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu Sosiologi dan Administrasi negara modern. Weber lahir di Erfurt Jerman pada tahun 1864 dan meninggal di Munchen, Jerman pada tahun 1920 (Yogyakarta, 2021). Weber selama hidupnya banyak menghasilkan karya berupa buku dan teori-teori sosial yang masih dipelajari oleh banyak akademisi hingga saat ini.

Kaitannya dengan otoritas, diskusi otoritas selalu merujuk pada Max Weber. Secara konseptual, otoritas dapat dimaknai sebagai kekuasaan untuk mengontrol dan mempengaruhi orang lain. Otoritas ini tidak dimiliki oleh sembarang orang akan tetapi hanya dimiliki oleh orang

yang dianggap pantas dengan kriteria-kriteria tertentu (Mushonnif, 2013). Weber memaknai otoritas secara lebih kompleks karena menurut konsepnya, selamanya otoritas selalu berjalın-berkelindan bersama legitimasi. Weber dalam bukunya *The Types of Legitimate Dominatin*, kemudian mengkonstruksi otoritas kedalam tiga tipologi; otoritas tradisional, karismatik dan legal-rasional (Hansen, 2001).

i. Otoritas Kepemimpinan Tradisional

Tipe otoritas kepemimpinan tradisional ini merupakan otoritas yang dimiliki pemimpin karena adanya hubungan dengan pemimpin terdahulu dari para pengikutnya, sehingga pengikut yang telah memiliki rasa patuh terhadap pemimpinnya terdahulu secara otomatis akan mengikuti dan patuh terhadap otoritas yang dibuat oleh pemimpin mereka yang baru, walaupun aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan harapan para pengikutnya, namun mereka tetap akan menghormati atau melaksanakan aturan tersebut.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dapat disebut otoritas tradisional apabila mendapat legitimasi yang didasarkan pada kepercayaan yang sudah mapan dalam sebuah tradisi. Di sisi lain juga telah mendapat legitimasi dari orang-orang yang yang melaksanakan otoritas menurut tradisi tersebut. Terdapat kebajikan yang dikemukakan oleh sang pemimpin dan mendapat kepercayaan dari pihak pengikut. Pola ini kemudian menghasilkan sitem relasi (*personal attachment*) (Chairi, 2019). Sistem otoritas tradisional ini dapat kita temui pada masyarakat yang menganut sistem feodalisme.

Dalam otoritas kepemimpinan tradisional, pemimpin biasanya diberi gelar Lord, Barron, Kanjeng Raden Mas, ataupun Tumenggung, bahkan bisa juga raja. Mereka dibantu para staf yang biasanya diangkat dari kaum kerabat pemimpinnya. Pola kepemimpinannya bersifat konservatif yang cenderung mempertahankan nilai-nilai kehidupan tradisional. Kadang dipadukan dengan klenik dan mistis untuk memperkuat keyakinan pengikutnya. Terkadang, otoritas kepemimpinan tradisional ini juga bersifat “irasional” dalam arti bahwa kekuasaannya tidak dilengkapi dengan aturan formal, prosedur yang pasti serta preseden hukum, oleh karena itu, pemimpin boleh dan bebas mengeluarkan sebuah perintah selama berpatokan pada tradisi yang berlaku (Royce, 2015).

Weber juga menyampaikan analisisnya tentang otoritas kepemimpinan tradisional yang terkungkung dalam “birokrasi” yang dikuasai oleh satu orang saja. Contoh praktek kepemimpinan tradisional menurut Weber adalah kekuasaan yang dijalankan gereja abad pertengahan, imperium Romawi Suci dan aneka perusahaan joint-venture yang dikelola tentara Charlemagne. Weber menyebut birokrasi model tersebut sebagai “sultanisme”, dengan sifat keorganisasian yang sangat tidak stabil. Begitupula dengan praktek kepemimpinan di Cina, Afrika dan Roma, yang menunjukkan ciri kekuasaan terpusat dan mengikuti nilai tradisi. Weber kemudian merangkum praktek kepemimpinan dan perolehan kekuasaan itu dalam sebuah ideal typhus yang ia beri nama Otoritas Tradisional. Dapat dikatakan bahwa otoritas kepemimpinan tradisional bertahan untuk melestarikan sebuah kekuasaan yang diperoleh secara turun-temurun dalam sebuah sistem yang konservatif (Hadden, 1997).

ii. *Otoritas Kepemimpinan Karismatik*

Otoritas kepemimpinan karismatik bersandar pada mutu luar biasa (istimewa dan unggul) yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Otoritas kepemimpinan karismatik muncul pada diri seseorang yang menonjol dan menunjukkan sifat-sifat kepemimpinan yang kuat, atau disebut dengan “karisma”. Karisma sendiri menunjuk pada daya tarik luar biasa yang dimiliki seseorang sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai sebuah tujuan bersama dan menginspirasi orang untuk melakukan hal yang dikehendaki sebuah organisasi/ masyarakat.

Menurut Weber, pada tipe otoritas kepemimpinan karismatik, seseorang dipisahkan dari orang biasa dan diperlakukan seolah-olah ia memiliki kekuatan supranatural, supramanusia yang tidak dimiliki orang lain (Muhdyanto, 2018). Pemimpin karismatik merupakan sebuah fenomena sosial yang biasanya muncul dalam situasi krisis. Bila dikaitkan dengan sudut pandang konsep karisma dimaknai sebagai sebuah anugerah yang diberikan oleh rahmat Ilahi. Pemimpin karismatik dipandang sebagai juru selamat yang mistis, mempunyai harga diri dan kepribadian yang menarik. Pemimpin karismatik ini akan tampak nyata perannya ketika terjadi sebuah krisis dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dipahami karena pemimpin karismatik, karenan kekuatannya yang istimewa, berperan sebagai penyelamat dan mengeluarkan masyarakat dari situasi sulit saat terjadi krisis (Muchtaron, 2000).

Berdasarkan sudut pandang teologis, pandangan Weber tentang karisma dapat diformulasikan sebagai berikut: *Pertama*, karisma merupakan anugerah Ilahi yang diberikan kepada seseorang yang dikehendakiNya. Tidak ada seorangpun yang dapat memberikan campur tangannya dalam pemilihan anugerah itu; *Kedua*, Karisma mempunyai sifat luar biasa, berada di luar jangkauan akal manusia (*superhuman*), ini dapat disamakan dengan mukjizat yang diberikan pada para nabi ataupun kekuatan magis yang dimiliki orang-orang tertentu pada penganut keyakinan primitif; *Ketiga*, karena mempunyai karisma yang bersifat luar biasa maka pemiliknya dianggap sebagai pemimpin atau panutan dalam masyarakat, seperti halnya para nabi ataupun ulama yang memimpin masyarakat ke jalan keselamatan; *Keempat*, karisma buatan dapat diperoleh melalui upaya-upaya tertentu seperti bertapa maupun perilaku religius lainnya (Muchtaron, 2000).

Weber menandai bahwa seorang pemimpin karismatik memiliki beberapa unsur kepribadian, kemampuan dan kepribadian tertentu. Pada umumnya, pemimpin karismatik mempunyai menampilkan sifat-sifat kejiwaan seperti ekspresi emosional yang luar biasa, rasa percaya diri yang tinggi, keteguhan hati, dan terbebas dari adanya pertentangan batin. Pemimpin semacam ini mempunyai keyakinan yang teguh terhadap kebenaran yang diyakini (Weber, 1964). Terdapat beberapa perbedaan pemimpin karismatik dan non-karismatik apabila dilihat berdasarkan kualitas kepribadian dan karakteristiknya, secara lebih jelas perbedaan tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut ini (Muchtaron, 2000):

Jadual 1: Perbedaan pemimpin karismatik dan non-karismatik apabila dilihat berdasarkan kualitas kepribadian dan karakteristiknya (Mughtarom, 2000)

No	Pemimpin	
	Karismatik	Non-Karismatik
1	Menentang status quo	Mempertahankan status quo
2	Pandangan jauh ke depan	Pandangan hanya untuk masa kini
3	Senang terhadap idealisme meski berbenturan dengan arus keumuman	Senang diikuti
4	Semangat membantu dengan percobaan	Tidak tertarik membantu karena beresiko secara pribadi
5	Bersikap inkonvensional dalam mengatasi sebuah permasalahan	Bersikap konvensional dalam mengatasi sebuah permasalahan
6	Mempunyai kebutuhan yang tinggi terhadap perubahan	Tidak terlalu butuh melakukan perubahan
7	Kuat dan inspiratif dalam memimpin	Lemah dalam memimpin
8	Kekuatan atas dasar keahlian dan kepahlawanan	Kekuasaan atas dasar jabatan dan imbalan
9	Elitis, keteladanan dan radikal	Egaliter. Konsensus dan mencari pengikut

iii. *Otoritas Kepemimpinan Legal-Rasional*

Tipe otoritas kepemimpinan legal-rasional adalah kepemimpinan yang diperoleh dengan cara seleksi menurut aturan-aturan yang sah oleh sebuah organisasi birokrasi. Bawahan dalam tipologi otoritas kepemimpinan legal-rasional, dikenal dengan istilah rakyat. Rakyat akan selalu patuh pada pemimpinnya karena diikat oleh undang-undang yang legal dan rasional. Pemimpin dalam tipologi ini mempunyai wewenang kepemimpinan yang paling kuat dan jelas batasan-batasannya dibandingkan dengan tipologi otoritas kepemimpinan yang lain. Bagi Max Weber, otoritas kepemimpinan legal-rasional dapat memungkinkan tumbuhnya stabilitas sosial dalam jangka panjang, hal ini tentu berbeda dengan otoritas kepemimpinan tradisional dan karismatik yang berlangsung dalam jangka pendek (biasanya hanya sampai wafatnya sang pemimpin). Aturan-aturan impersonal dapat membuat segala sesuatunya mendapat pedoman pelaksanaan. Dan siapapun, asal memiliki kompetensi, dapat menjadi pemimpin yang memegang otoritas (Hadden, 1997).

Dalam konteks masyarakat Jawa, tipologi otoritas kepemimpinan ini dapat ditemukan setelah kemerdekaan Indonesia dengan pemilihan kepala negara melalui mekanisme pemilihan yang diatur oleh undang-undang. Pola kepemimpinan semacam ini dibatasi oleh perangkat undang-undang yang melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan pemimpinnya (Royce, 2015).

Apabila disarikan, terdapat beberapa sikap yang mencirikan kepemimpinan legal-rasional, yaitu (Hadden, 1997):

1. Diterapkan dan disetujuinya norma-norma legal.
2. Terdapat sebuah sistem yang sengaja dibangun.
3. Pemimpin juga merupakan subyek dari aturan impersonal.
4. Kepatuhan pada otoritas adalah bukan kepada pemimpin secara personal, namun pada hukum tertulis (impersonal).

Proses Terbentuknya Kepemimpinan dalam Masyarakat Jawa

Pada masyarakat Jawa di Surakarta, seorang pemimpin yang terpilih harus mendapatkan legitimasi dari anggotanya atau masyarakat yang dipimpinnya. Pemimpin memiliki wewenang memimpin secara resmi setelah mendapat legitimasi berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dalam adat istiadat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Prosedur tersebut tentu saja berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya dan dari satu waktu dengan waktu lainnya. Misalnya dalam masyarakat tradisional, penulis menyebutnya sebagai Priyayi, legitimasi atas kepemimpinan seseorang biasanya dilakukan dengan serangkaian upacara yang melibatkan kehadiran roh nenek moyang atau dewa-dewa. Menurut Kartodirjo, wahyu, nurbuat, pulung, ngalamat, dan mimpi merupakan unsur yang berperan penting baik dalam pemilihan pemimpin maupun legitimasi atas kepemimpinannya. Misalnya pada pemilihan raja pada era kerajaan Jawa. (Kartodirjo, 1975). Oleh karena itu, untuk memperoleh kekuasaan dalam kepemimpinan, seseorang harus menempuh berbagai jalan (laku) yang panjang. Kekuasaan dapat pula diperoleh melalui keturunan atau lewat kekuatan fisik.

Dalam pandangan masyarakat Jawa pedesaan (dalam trikotomi Geertz disebut Abangan), seorang calon pemimpin yang berhasil terpilih harus mendapat pengakuan dari masyarakat. Masyarakat Jawa masih mempercayai bahwa seseorang pemimpin harus memenuhi syarat wibawa, wewenang, karisma dan kekayaan.

Sementara itu, kepemimpinan di kalangan Santri berada di tangan figur panutan spiritual yang disebut Kyai. Kyai dipilih sebagai pemimpin karena penguasaan ilmu agamanya yang dalam dan karismanya yang kuat, yang ditunjukkan dengan sikap shalihnya. Biasanya, apabila Kyai wafat, kepemimpinan di pesantren diserahkan kepada putra Kyai yang memang sedari kecil telah dididik secara intensif untuk menguasai ilmu agama dan mempunyai akhlak yang mulia. (Wahyudi, 2011)

Pada zaman modern, kepemimpinan dapat pula diperoleh melalui pendidikan dan pemilihan berdasarkan keahlian atau spesialisasi. Untuk menduduki berbagai level tidak lagi mendasarkan pada keturunan, melainkan pada tingkat pendidikan formal. Masyarakat modern memandang legitimasi seorang pemimpin diperoleh apabila telah melalui proses pemilihan yang sah sesuai undang-undang yang berlaku. Syarat bagi kepemimpinan adalah mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin rakyat dengan baik menuju tercapainya tujuan bersama.

Gaya Kepemimpinan Masyarakat Jawa Surakarta

Ciri kekuasaan Jawa Surakarta lekat dengan pemimpinnya sehingga seseorang yang menjadi pemimpin harus mempunyai kelebihan dan wibawa yang tinggi. Dalam hal suksesi, Endraswara menyebutkan ada ciri khas dalam suksesi kepemimpinan Jawa, yaitu : pertama; pengganti pimpinan harus *trahing kesuma rembesing madu*, maksudnya adalah masalah keturunan sangat dipertimbangkan. *Trah* menjadi syarat utama dalam dunia kepemimpinan Jawa; kedua, dipilih oleh pemimpin sebelumnya dengan jalan ditunjuk asalkan kriteria terpenuhi. Yang ditunjuk wajib menerima dan mengikuti perintah pemimpin terdahulu, ketiga, tidak ada perodesasi kepemimpinan. Biasanya kalau pemimpin masih sehat wal afiyat maka tidak akan terjadi suksesi kepemimpinan. (Endraswara, 2013).

Bagi masyarakat Jawa Surakarta, figur pemimpin harus mempunyai tiga sikap yaitu; (a) melindungi (ngayomi) dengan berbagai keamanan dan kenyamanan, (b) mensejahterakan (ngayemi), seluruh warga harus selalu hidup cukup, tidak kekurangan harta benda, (c) ajur ajer yaitu melebur dengan rakyat. (Endraswara, 2013)

Dharma menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan berbeda. Gaya adalah kondisi pemaknaan budaya. Gaya membentuk identitas baru. Setiap gaya kepemimpinan mempunyai nilai yang berbeda. Kategori itu tergantung dengan kondisi yang dipimpin. Selanjutnya, Dharma mendefinisikan gaya kepemimpinan sebagai “perilaku yang ditunjukkan seseorang pada saat ia mencoba mempengaruhi perilaku orang lain” (Dharma, 1984).

Pada praktek kepemimpinannya, masyarakat Jawa Surakarta mempunyai gaya kepemimpinan tersendiri. Terdapat tiga tingkatan dalam kepemimpinan Jawa Surakarta yaitu: nistha, madya dan utama (hina-tengah-utama). Tingkatan yang paling berkualitas adalah tingkat utama. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan utama selalu banyak disukai rakyat. Endraswara menyebut ada lima gaya kepemimpinan di Jawa yang disebut 5M, yaitu; 1) *melek* (awas/controlling), 2) *milik* (merasa memiliki/ melu handarbeni), 3) *muluk* (mengentaskan kemiskinan), 4) *melok* (mampu merealisasikan aspirasi rakyat), dan 5) *meluk* (mampu merangkul rakyat). (Endraswara, 2013).

Analisis Teori Otoritas Kepemimpinan Max Weber dalam Kepemimpinan Masyarakat Jawa

Pada bagian ini, penulis akan mencoba melakukan identifikasi proses terbentuknya kepemimpinan masyarakat Jawa di masing-masing klasifikasi yang dikemukakan Geertz, Abangan-Santri-Priyayi, lalu mendeskripsikan gaya kepemimpinannya kemudian melakukan kategorisasi dengan teori trikotomi otoritas kepemimpinan Max Weber melalui pendekatan antropologis.

i. Kepemimpinan Pada Golongan Masyarakat Abangan

Dalam falsafah Jawa, terdapat banyak ragam *piwulang* dan *pitutur* yang mengajarkan tentang sifat-sifat seorang pemimpin. Ki Hadjar Dewantara juga mengajarkan tentang kepemimpinan, beliau menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai tiga pilar, yaitu: “*ing ngarso sung tuladha, ing madya mangunkarsa, tut wuri handayani.*” Dalam tradisi masyarakat Jawa juga dikenal ajaran tentang sifat kepemimpinan yang disebut “papat T” yaitu; *teteg* sebagai pengayom, *tatag* – berani, *tangguh* – kuat, *tanggon* – pantang mundur. (Wahyudi, 2011)

Kepemimpinan dalam masyarakat Abangan biasanya diperoleh dengan laku tertentu sehingga seseorang semakin memancarkan aura kepemimpinan dan dapat dipilih sebagai pemimpin masyarakat. Untuk menjaga keberlangsungan kepemimpinan, pemimpin di masyarakat Abangan harus memelihara sifat-sifat kepemimpinan di atas (Sari, 2019).

Endraswara menyebutkan beberapa ciri kepemimpinan Jawa, yaitu monocentrum (figur tunggal), metafisis (wahyu, *pulung*, drajat, keturunan/ *nunggak semi*), pragmatis (mencalonkan pemimpin dengan *laku broto/ lelaku/ ritual*), etis (yang diidamkan dapat membedakan yang baik dan yang buruk), dan sinkretis (mengambil konsep-konsep dari ajaran Hindu dan Islam) (Endraswara, 2013).

Dalam konteks teori otoritas kepemimpinan Weber, kepemimpinan dalam masyarakat Abangan dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan karismatik karena mensyaratkan sifat-sifat yang menonjol sebagai pemimpin yang mendapat pengakuan masyarakat. Masyarakat Jawa di Surakarta meyakini bahwa orang yang mampu membawa kepada keselamatan adalah orang yang pantas dijadikan pemimpin. Juru selamat tersebut hendaknya mempunyai keunggulan kepribadian, keilmuan dan pengaruh yang kuat. Apabila masyarakat mengikuti kepemimpinan orang-orang khusus tersebut maka akan memunculkan rasa damai dan tentram dan kepatuhan terhadap kepemimpinannya (Sari, 2019).

ii. *Kepemimpinan Pada Golongan Masyarakat Santri*

Bagi kalangan santri, pemegang otoritas kepemimpinan adalah kyai. Kyai diakui sebagai pemimpin karena kapasitasnya dalam ilmu agama Islam jauh melebihi orang kebanyakan. Seorang kyai harus menguasai beragam ilmu keagamaan agar layak menjadi kyai. Seorang kyai tidak terpilih melalui faktor keturunan kecuali putra kyai memang mempunyai kapasitas yang disyaratkan untuk diangkat sebagai kyai. Bila tidak, maka santri maupun siapa saja yang memiliki kedalaman ilmu agama berhak untuk menjadi kyai.

Kyai bertugas memimpin para santri dalam sebuah lembaga pendidikan Islam bernama pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren inilah seorang kyai mempunyai legitimasi memimpin dan bahkan mendidik para santri. Dalam tradisi pesantren, seorang santri harus bersikap hormat dan takzim pada sang kyai. Berlaku hukum tidak tertulis di pesantren bahwa perkataan kyai tidak elok bila tidak ditaati oleh santri. Budaya ngalap berkah pada kyai yang dilakukan oleh para santri semakin meneguhkan legitimasi kepemimpinan kyai di pesantren. (Wahyudi, 2011).

Apabila dihubungkan dengan konteks kepemimpinan di pesantren, kepemimpinan karismatik dalam definisi Weber tampak jelas dari figur kyai sebagai pemegang otoritas kepemimpinan tertinggi yang dianggap mempunyai kekhususan dalam hal kualitas keilmuan, keagamaan maupun keistimewaan lain yang tidak dimiliki orang-orang kebanyakan. Ini menimbang ada begitu banyak syarat kelebihan dan keistimewaan yang harus dimiliki seorang kyai. Kyai harus memiliki kapasitas keilmuan agama Islam yang tinggi dan kapasitas kepribadian yang baik. (Rosita, 2018). Karakter seorang kyai dituntut agar kuat, dapat memberi pengaruh positif bagi para santri dan memiliki pandangan yang visioner. Ciri kepemimpinan kyai yang khas adalah adanya keyakinan yang kuat dari pengikutnya (santri) terhadap cara hidup agamis yang diajarkan oleh kyai. Keyakinan itu muncul seiring dengan kemampuan kyai menjaga keindahan akhlak dan semangatnya untuk membantu para santri agar selamat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya (Wahyudi, 2011). Fenomena keyakinan yang kuat terhadap kyai dimanifestasikan dalam sikap *taklid* (mengikuti dengan tidak mengetahui ilmunya) yang hampir menjadi tradisi dalam keseharian kehidupan santri. Menurut analisa Wahyusumidjo, karisma kepemimpinan kyai terkait erat dengan penguasaan keilmuannya yang tinggi (Anwar, 2010).

iii. *Kepemimpinan Pada Golongan Masyarakat Priyayi*

Masyarakat priyayi, ditandai dengan kehidupan yang penuh tata krama dan birokrasi ketat. Dalam struktur sosial masyarakat Jawa, kaum priyayi ini menempati hunian di keraton maupun di luar

keraton akan tetapi masih ada hubungan kerabat dengan keraton. Para raja, keturunan raja, bangsawan, dan para pejabat keraton menduduki golongan priyayi ini (Endraswara, 2013).

Dalam hal kepemimpinan, kaum priyayi menentukan pemimpin dengan jalur keturunan. Anak raja otomatis kelak akan menjadi raja, dan seterusnya. Kepemimpinan priyayi, dalam hal ini raja, berpusat di keraton dengan wilayah kekuasaan tertentu. Kepemimpinan raja sifatnya mutlak, perintah raja tidak boleh dilanggar. Dalam melaksanakan kepemimpinannya, raja dibantu oleh patih dan para menteri/ punggawa kerajaan (Koentjaraningrat, 1980).

Menurut teori otoritas kepemimpinan Weber, pola ini termasuk dalam tipologi kepemimpinan tradisional. Meskipun begitu, pada konteks masyarakat Jawa di Surakarta, seorang raja dibatasi kekuasaannya dengan undang-undang yang harus dipatuhi. Artinya, ada persinggungan antara tipologi kepemimpinan tradisional dengan tipologi kepemimpinan legal-rasional disini bahkan terdapat pula unsur kepemimpinan karismatik karena raja harus berwibawa dan memiliki kelebihan tertentu. Namun, bila dilihat dari pola terbentuknya kepemimpinan di keraton, lebih dominan cirinya sebagai tipologi kepemimpinan tradisional. Hal tersebut ditandai dengan sistem kepemimpinan turun-temurun (monarki) dan upaya legitimasi kekuasaan dengan melibatkan unsur pelestarian budaya. Misalnya, penyebutan raja sebagai penerima “pulung” (wahyu aji) yang merupakan tanda terpilihnya seseorang sebagai pemimpin atas perintah “langit”. Kemudian kekuasaan dalam masyarakat priyayi selalu dilingkupi oleh aturan tradisi baik berupa keyakinan, seni, dan tata-krama (Endraswara, 2013).

KESIMPULAN

Hasil analisis terkait dengan kepemimpinan masyarakat Jawa di Surakarta dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: *pertama*, Kepemimpinan golongan Abangan. Berdasarkan analisis teori otoritas kepemimpinannya Weber, gaya kepemimpinan golongan Abangan dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan karismatik karena mensyaratkan sifat-sifat yang menonjol sebagai pemimpin sehingga mendapat pengakuan dan kepatuhan dari masyarakat; *kedua*, Kepemimpinan pada golongan Santri, dalam hal ini kyai di pesantren. Berdasarkan analisis teori otoritas kepemimpinannya Weber dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan karismatik. Ini menimbang ada begitu banyak syarat kelebihan dan keistimewaan seseorang untuk dapat disebut kyai berupa penguasaan ilmu agama yang tinggi. Karisma ini harus dibedakan maknanya dengan karisma pada masyarakat Abangan yang ditandai dengan kelebihan berupa kekuatan gaib maupun keistimewaan lain yang bertalian dengan klenik; dan *ketiga*, Kepemimpinan dalam masyarakat Priyayi. Berdasarkan analisis dari teori otoritas kepemimpinan Weber, dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan tradisional. Meskipun begitu, seorang raja dibatasi kekuasaannya dengan undang-undang yang harus dipatuhi. Artinya, ada persinggungan antara tipologi kepemimpinan tradisional dengan tipologi kepemimpinan legal-rasional, bahkan terdapat pula unsur kepemimpinan karismatik karena raja harus berwibawa dan memiliki kelebihan tertentu. Meskipun demikian, pola terbentuknya kepemimpinan di keraton lebih dominan cirinya sebagai tipologi kepemimpinan tradisional yang diperoleh melalui jalur keturunan dan upaya pelestarian budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A. K. (2016). Jejak Clifford Geertz di Indonesia: Mengoreksi Trikotomi Abangan, Santri dan Priyayi. *Mozaic Islam Nusantara*, 3.
- Anwar, K. (2010). Kepemimpinan Kyai di Pesantren: Studi Terhadap Pondok Pesantren di Jambi. *Kontekstualita*, 227.
- Chairi, E. (2019). Ketiadaan Otoritas Terpusat Dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia; Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber. *Sangkep; Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 201.
- Dharma, A. (1984). Kepemimpinan Yang Efektif Bagi Para Manajer. Dalam A. Dharma, *Manajemen Yang Efektif Bagi Para Manajer* (hal. 88). Bandung: Sinar Baru.
- Endraswara. (2013). Falsafah Kepemimpinan Jawa Sepanjang Zaman. Dalam Endraswara, *Falsafah Kepemimpinan Jawa Sepanjang Zaman* (hal. 30). Yogyakarta: Narasi.
- Geertz, C. (2014). *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa (terj.)*. Depok: Penerbit Komunitas Bambu.
- Hadden, R. W. (1997). *Sociology Theory: An Introduction to the Classic Tradition*. Ontario: Broadview Press.
- Hansen, G. (2001). *Max Weber, Charisma, and The Disenchantment of the World (Chapter 8)*. Xlibris.
- Kartodirjo, S. (1975). *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Koentjaraningrat. (1980). *Beberapa Pokok antropologi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muchtarom, Z. (2000). Konsep Max Weber Tentang Kepemimpinan Karismatik. *Refleksi*, 17-18.
- Muhdyanto, F. (2018). *Analisi Teori Otoritas Max Weber dalam Kepemimpinan Dukun Adat di Masyarakat Suku Tengger*. Surakarta: UNS Press.
- Mushonnif, A. (2013). Fragmentasi Otoritas Antara Organisasi Pemerintah dan Organisasi Keagamaan Dalam Penentuan Awal Bulan Islam. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 167.
- Nawawi, H., & Hadari, M. (1993). *Kepemimpinan Yang Efektif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rivai, V. (2017). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rosita, N. (2018). Kepemimpinan Karismatik Kyai di Pondok Psantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. *Sangkep*, 174-175.
- Royce, E. (2015). *Classical Social Theory and Modern Society: Marx, Durkheim, Weber*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Salam, A. (2014). *Manajemen Insani dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sari, H. K. (2019). *Fungsi dan Peran Abdi Dalem di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat*. Surakarta: Unnes Press.
- Tiwikromo, T. (2008). Kepemimpinan Jawa dalam Masyarakat Kontemporer. *Seminar Budaya Untuk Memperingati Hari Jadi Kota Semarang ke-461* (hal. 17). Semarang: Pemprov. Jawa Tengah.
- Wahyudi, S. S. (2011). Kepemimpinan Tradisional Jawa-Islam dalam Masyarakat Jawa. *Sabda*, 27.
- Weber, M. (1964). *Sociology of Religion*. Boston: University of Boston.
- Wirawan. (2017). *Kepemimpinan; Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yogyakarta, D. K. (2021, Juli). <https://kebudayaan.jogjakarta.go.id>. Dipetik Januari Selasa, 2022, dari <https://kebudayaan.jogjakarta.go.id>: <https://kebudayaan.jogjakarta.go.id>